



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
KPKNL Pematangsiantar  
**2025**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025. KPKNL Pematangsiantar telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pematangsiantar atas pencapaian tujuan/sasaran strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi.

Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 merupakan bahan monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2025 dan basis perencanaan kinerja tahun berikutnya. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematangsiantar tahun 2025 sebesar 115,98% yang diperoleh dari capaian atas 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 8 (delapan) Sasaran Strategis. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, mayoritas IKU telah mencapai target dan kami senantiasa berupaya meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih banyak pada segala pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2025. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja yang telah diraih KPKNL Pematangsiantar pada tahun 2025 berupa keberhasilan, kegagalan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi.

Pematangsiantar, 20 Februari 2026

Kepala KPKNL Pematangsiantar



Ditandatangani secara elektronik

Harmonis Siregar  
NIP 19691122 199603 1 001



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
A.    Tujuan dan Sasaran Strategis .....	iv
B.    Pencapaian Sasaran Strategis .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A.    Latar Belakang .....	2
B.    Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematangsiantar .....	3
C.    Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar .....	7
D.    Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja .....	10
E.    Sistematika Laporan .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A.    Rencana Strategis.....	14
B.    Ringkasan Perjanjian Kinerja .....	16
C.    Pengukuran Kinerja.....	21
D.    Perjanjian Kinerja Tahun 2026 .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A.    Capaian Kinerja Organisasi.....	25
B.    Realisasi Anggaran .....	55
C.    Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	55
BAB IV PENUTUP .....	59
A.    Simpulan Umum.....	59
B.    Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang .....	61

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. Tujuan dan Sasaran Strategis

Laporan akuntabilitas Kinerja KPKNL Pematangsiantar dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2025. Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2025 menggambarkan capaian kinerja yang telah berhasil dicapai oleh KPKNL Pematangsiantar pada tahun 2025 sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN untuk tahun 2025-2029 yaitu:

**“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, DJKN telah menetapkan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk membantu memudahkan pencapaian visi dan misi dalam rencana Strategis KPKNL Pematangsiantar ke dalam rencana kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama.

## B. Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Kemenkeu Three KPKNL tahun 2025 adalah sebesar 115,98% dengan rincian sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>						
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-				
1a-CP	Indeks Integritas	P/L	100,00	105,32	105,32	105,32
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	124,67%	124,67	120,00
<b>Customer Perspective (20%)</b>						
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100,00%	101,48%	101,48	101,48
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100,00%	116,87%	116,87	116,87
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100,00%	418,77%	418,77	120,00
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	P/M	77,00	95,94	124,60	120,00
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74,00	98,41	132,99	120,00
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>						
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					

4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	216,42%	216,42	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100,00%	120,00%	120,00	120,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	110,00%	110,00	110,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	113,10%	161,56	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	110,33%	137,91	120,00
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>						
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100,00	120,00	120,00	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80,00%	94,00%	117,50	117,50
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100,00	115,07	115,07	115,07
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80,00	114,25	142,81	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80,00	98,90	123,62	120,00
<b>NKO</b>					<b>115,98</b>	

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negate dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan admnistrasi KPKNL.

Dengan motto “*Mauliate*” (*Mandiri, Unggul, Integritas, Akuntabel, Tepat Waktu*), seluruh pejabat/pegawai KPKNL Pematangsiantar telah bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam *Kemenkeu Three* tahun 2025 dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, dan penuh keikhlasan.

Akhir kata dengan semangat Birokrasi Reformasi dan untuk mewujudkan **Good Governance** dalam pelayanan kepada *stakeholders/ customers* maka KPKNL Pematangsiantar akan tetap berpedoman pada serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

An illustration of two hands in blue, one holding a rolled-up yellow document with a green band. The background is a gradient of orange and blue.

# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematangsiantar
- C. Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar
- D. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja
- E. Sistematika Laporan

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Pematangsiantar dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas Kinerja KPKNL Pematangsiantar dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang disampaikan kepada *stakeholders* melalui Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2025. Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2025 menggambarkan capaian kinerja yang telah berhasil dicapai oleh KPKNL Pematangsiantar pada tahun 2025 sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematangsiantar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 PMK nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Pematangsiantar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL

Sesuai dengan PMK nomor 154/PMK.01/2021, wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar meliputi:

1. Kota Pematangsiantar
2. Kota Tebing Tinggi
3. Kabupaten Samosir
4. Kabupaten Simalungun
5. Kabupaten Toba
6. Kabupaten Dairi
7. Kabupaten Pakpak Bharat

KPKNL Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan susunan organisasi terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Gambar 1.1.

Diagram 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Pematangsiantar



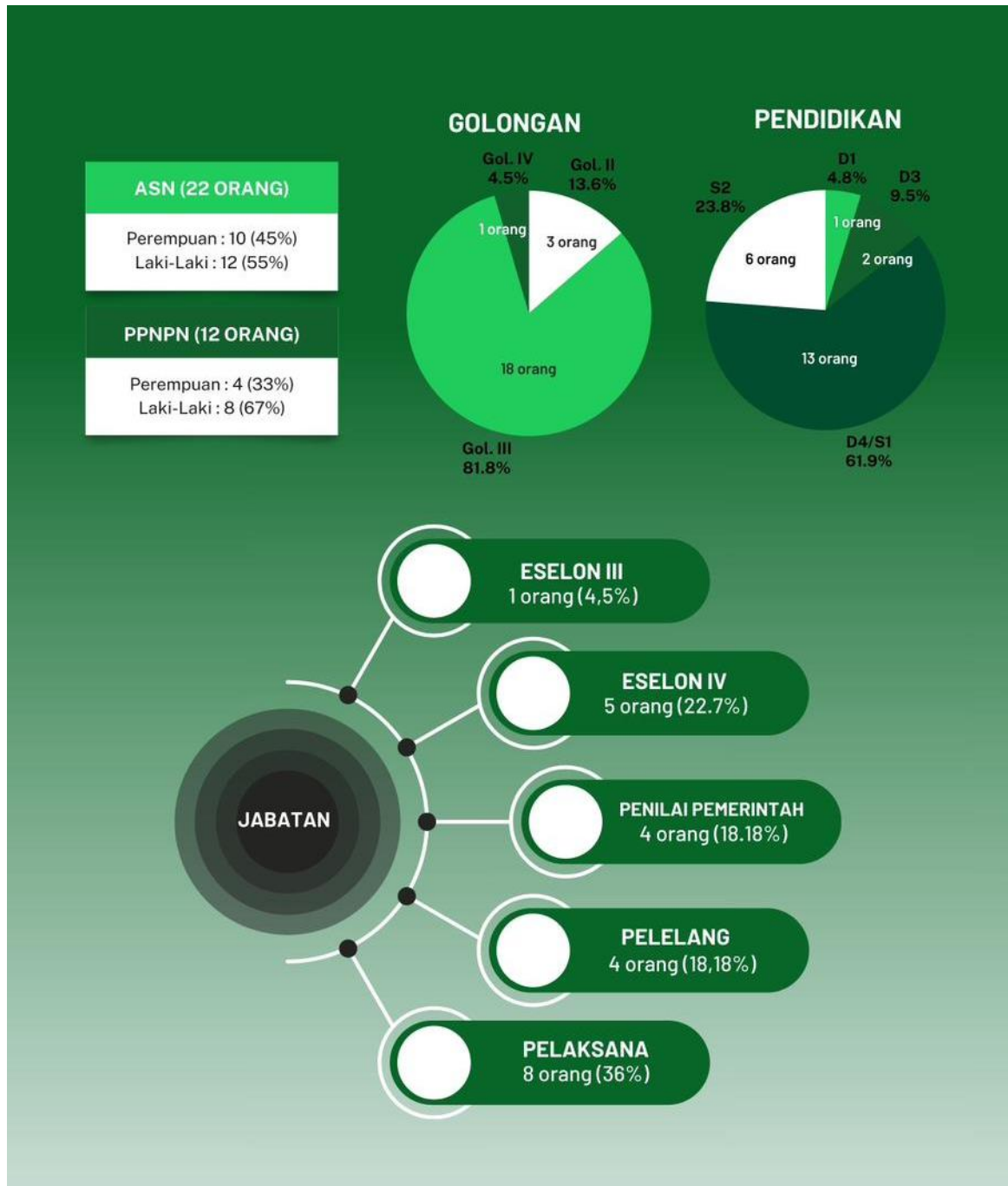
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit pada KPKNL Pematangsiantar adalah:

1. **Subbagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. **Seksi Piutang Negara (PN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. **Seksi Hukum dan Informasi (HI)**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. **Seksi Kepatuhan Internal (KI)**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)**, terdiri dari Jabatan Fungsional Pelelang dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela, sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Pelaksana Umum**, adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan

mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi KPKNL Pematangsiantar didukung oleh sumber daya manusia. Adapun jumlah pegawai pada periode 31 Desember 2025 pada KPKNL Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

Diagram 1. 2 Komposisi Pegawai



### C. Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Pematangsiantar memiliki peran strategis sebagai berikut :

#### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Pematangsiantar turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Pematangsiantar selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Pematangsiantar senantiasa mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan 3T dalam pengelolaan BMN, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik. Terlebih dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan BMN, maka DJKN dituntut untuk dapat menjadi distinguished asset manager. Hal tersebut berarti sebuah tantangan untuk menjadi asset manager yang disegani dan dihormati dalam efektifitas dan produktifitas yang kemudian betul-betul bisa mengelola aset menjadi bermanfaat baik dari sisi ekonomi, sosial dan juga finansial. Pengelolaan BMN didorong agar mampu berperan dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional.

#### 2. Penilaian

Penilaian terhadap Kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN.

Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

### 3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan piutang berdasarkan PP nomor 33 tahun 2006 dilakukan terhadap piutang negara BUMN yang telah diserahkan dan piutang macet non perbankan yang berasal dari BUMN atau instansi pemerintah. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), ruang lingkup pengurusan piutang negara menjadi tidak hanya terbatas pada PUPN, tapi juga meliputi pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga yang mencakup penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

### 4. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset yang terbuka untuk umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-auction*). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga

memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

#### **5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh KPKNL Pematangsiantar adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN. Biaya Administrasi (Biad.) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang berupa bea lelang penjual dan/ atau bea lelang pembeli. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **6. Hukum dan Informasi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Pematangsiantar juga menghadapi berbagai permasalahan hukum. Upaya penegakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi lelang maupun sita, pada kondisi tertentu dapat beririsan dengan kepentingan pihak-pihak yang tidak patuh atau yang masih menempuh upaya hukum. Dalam konteks tersebut, Seksi Hukum dan Informasi memiliki peran strategis. Seksi Hukum dan Informasi bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan hukum.

Selain menjalankan fungsi di bidang hukum, Seksi Hukum dan Informasi juga berperan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan perangkat, jaringan, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu, Seksi Hukum dan Informasi melaksanakan pengawasan atas implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi, dan pengelolaan hubungan masyarakat melalui penyusunan berita, pengelolaan media sosial, serta penyebaran informasi melalui berbagai media, baik grafis, fotografi, maupun videografi.

#### **7. Kepatuhan Internal**

Unit Kepatuhan Internal merupakan unit khusus pada KPKNL Pematangsiantar yang berperan dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi pengendalian internal. Pada KPKNL Pematangsiantar, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Internal yang memiliki tugas menyiapkan bahan bimbingan, rencana kerja, dan rencana strategis, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Selain itu, Seksi Kepatuhan Internal bertugas melaksanakan pemantauan pengendalian internal, pengelolaan kinerja dan risiko, memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta menindaklanjuti hasil pengawasan.

Keberadaan Seksi Kepatuhan Internal memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian permasalahan secara cepat, transparan, dan akuntabel, serta dalam mengantisipasi terjadinya kesalahan yang lebih besar dan berulang, karena menjadi bagian integral dari manajemen unit kerja.

#### 8. Zona Integritas WBK/ WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, dan melayani melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Pada tahun 2024, KPKNL Pematangsiantar telah berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diperoleh sejak tahun 2022.

Pada tahun 2025, KPKNL Pematangsiantar tetap berkomitmen untuk mempertahankan predikat WBBM, melalui pelaksanaan berbagai langkah strategis dan berkelanjutan, antara lain:

- a. Membuat perencanaan dan penetapan target prioritas;
- b. Membangun komitmen dan pola pikir yang solid;
- c. Mendorongkan dan mengembangkan inovasi layanan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- e. Melakukan koordinasi dan sinergi berkesinambungan;
- f. Memperkuat pengelolaan pengaduan dan kepuasan pengguna layanan;
- g. Menjaga konsistensi penerapan standar pelayanan dan integritas.

#### D. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Pematangsiantar mengalami beberapa kendala/ permasalahan utama, di antaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait Pengelolaan Kekayaan Negara
  - a. Satuan kerja tidak segera mengajukan berkas permohonan sertipikasi ke Kantor Pertanahan. Adanya keterlambatan atau kelalaian satuan kerja dalam menindaklanjuti proses sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, meskipun secara administratif maupun fisik aset tersebut telah dikuasai oleh negara. Seksi PKN telah melaksanakan mediasi dengan satuan kerja/KL, pihak ketiga yang menguasai, KPKNL, dan/atau melibatkan kantor desa dan/atau aparat setempat untuk penyelesaian sertipikasi tanah.
  - b. Optimalisasi penggunaan BMN *Underutilized* tidak terlaksana sesuai rencana. Penggunaan BMN *Underutilized* tidak terlaksana sesuai rencana naik pada Triwulan I 2025 karena IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan set negara merupakan IKU baru yang masih memerlukan penjelasan dan simulasi dari Kantor

Pusat untuk pelaksanaan dan perhitungan capaiannya. Selain itu, finalisasi formula IKU tersebut baru disampaikan pada akhir Triwulan I 2025. Pada triwulan II 2025, Seksi PKN telah memitigasi risiko tersebut dengan mengumpulkan/ menghitung form kesesuaian setelah optimalisasi.

- c. Penerimaan PNBP tidak maksimal karena persetujuan pemanfaatan yang tidak ditindaklanjuti. Hal ini terjadi karena pemindahtanganan BMN yang semakin terbatas mengingat adanya efisiensi pada K/L dan terbatasnya objek yang punya nilai besar untuk menerima PNBP dari pemanfaatan sewa. Pada triwulan II 2025, Seksi PKN telah melakukan mitigasi dengan berkoordinasi dalam rangka penggalan potensi PNBP, khususnya barang rampasan di Kejaksaan.

## 2. Permasalahan terkait Pengurusan Piutang Negara

- a. Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih.
- b. Kurangnya kesadaran debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.
- c. Barang jaminan berupa kendaraan dan tanah sebahagian besar tidak ditemukan sehingga tidak dapat diproses lelang dan menyebabkan kurang pedulinya debitur dalam menyelesaikan hutang.

Atas ketiga permasalahan tersebut, seksi PN telah melakukan penagihan secara langsung atau melalui telepon/ WhatsApp, berkoordinasi dengan Penyerah Piutang, dan melaksanakan penelitian lapangan.

## 3. Permasalahan terkait Pelayanan Lelang

- a. Banyaknya lelang Tidak Laku
- b. Jenis lelang HT mendominasi permohonan lelang

Pelelang mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan publikasi kegiatan lelang melalui media sosial, melakukan rapat koordinasi capaian kinerja lelang, mengikuti bimbingan teknis aplikasi lelang generasi 2, dan melakukan bimbingan teknis/sosialisasi aplikasi lelang generasi 2 kepada satuan kerja lelang.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada KPKNL Pematangsiantar sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi di KPKNL Pematangsiantar.

## E. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB I    Pendahuluan, menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

BAB II   Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar penetapan perjanjian kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2025 serta adendum perjanjian kinerja.

- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025.
- BAB IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Pematangsiantar serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPKNL Pematangsiantar untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selama tahun 2025 KPKNL Pematangsiantar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II dan Bab III Laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Pematangsiantar di tahun yang akan datang dalam pencapaian target yang lebih optimal.



02.

## Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Ringkasan Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Perencanaan strategis ditetapkan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul.

DJKN menyusun rencana strategis melalui suatu proses perencanaan yang berorientasi pada pencapaian hasil dalam periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, peluang yang tersedia, serta berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Perencanaan strategis tersebut disusun sebagai bentuk pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk memiliki rencana strategis sebagai dasar penyelenggaraan SAKIP dan wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 163/KN/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

” Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Penyusunan rencana kerja dan penetapan sasaran strategis pada KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN periode 2025-2029. Renstra tersebut disusun melalui proses yang berorientasi pada hasil guna mendukung visi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Sasaran Strategis ditetapkan KPKNL Pematangsiantar diarahkan pada empat fokus utama yaitu pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal sehingga mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, penyediaan layanan penilaian dan advokasi yang profesional serta relevan, penyelenggaraan layanan lelang yang modern, transparan, dan terpercaya, serta pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif. Dalam periode lima tahun pelaksanaan Renstra, yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, penamaan maupun tata letak sasaran strategis dalam peta strategis dapat mengalami penyesuaian guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan, dinamika lingkungan strategis, serta kebutuhan organisasi.

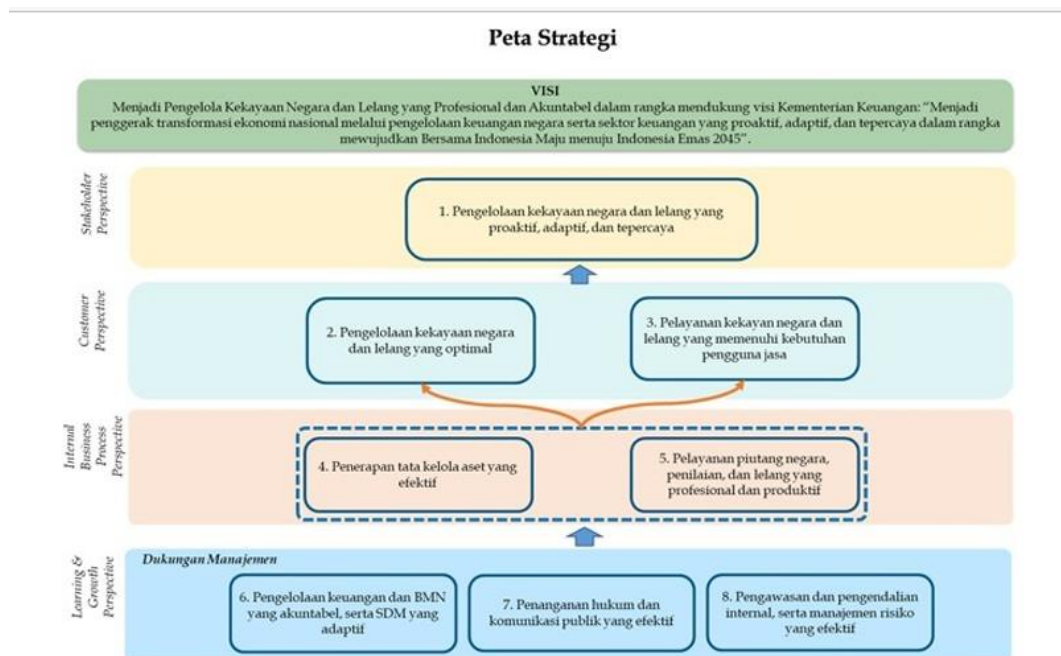
## B. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Pematangsiantar. Sasaran Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar, pada tanggal 30 Januari 2025.

Peta Strategis tersebut mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagaimana tertera pada bahan di bawah ini:

Diagram 2. 1 Peta Strategi KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025



Terdapat 4 perspektif dalam peta strategi KPKNL Pematangsiantar, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*, berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder;
2. *Customer Perspective*, berisi ekspektasi dari customer/pengguna jasa dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan;

3. *Internal Process Perspective*, berisi proses bisnis yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan; dan
4. *Learning and Growth Perspective*, berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Ada 8 (delapan) uraian Sasaran Strategis pada KPKNL Pematangsiantar, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Penetapan kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-2/WKN.02/2025 disusun mengacu pada peta strategis *Kemenkeu Three* terdiri 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Dari empat perspektif yang diterapkan, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan (18 delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan empat perspektif tersebut, Penetapan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 memuat 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja di lingkup KPKNL Pematangsiantar sebagaimana ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Nomor **PK-2/WKN.02/2025 tanggal 30 Januari 2025** telah mengalami **1 (satu) kali addendum** pada Triwulan IV Tahun 2025, yaitu **Addendum Perjanjian Kinerja Nomor 2A/WKN.02/2025**. Addendum atas perjanjian kinerja yang dilakukan meliputi perubahan Indikator Kinerja Utama dan perubahan Rincian Target Kinerja..

Rincian lengkap mengenai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 Sebelum Addendum**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks Integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,4M)
2.		2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang 100% (Rp90 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara 100% (Rp150 Jt)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan 77
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan 100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN 100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara 100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian 70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang 80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran 100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa 100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai 80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum 100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) 80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko 80

Tabel 2. 2 Rincian Target Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 Sebelum Adendum

Kode SS/IKU.	SS/ IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,4M)
<b>2.</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp90M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp150Jt)
<b>3.</b>	<b>Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4.</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5.</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6.</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							

Kode SS/IKU.	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7.</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8.</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

**Tabel 2. 3 Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Adendum Perjanjian Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi			
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,4 M)	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp8,3M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp90M)	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp128,9M)

**Tabel 2. 4 Perubahan Rincian Target Kinerja pada Adendum Perjanjian Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025**

Kode SS/IKU.	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Target							Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y		
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y									
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp8,3M)
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp128,9M)

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengelola kinerja organisasi dan kinerja pegawainya serta mengukur capaian kinerja pada tahun 2025, KPKNL Pematangsiantar berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sekaligus mencabut peraturannya yaitu KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize, minimize, maupun stabilize;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang telah ditetapkan, akan diupayakan secara optimal dengan realisasi pencapaiannya yang memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), arah kebijakan prioritas nasional, serta Rencana Kerja dan Anggaran (Renja/ RKA) Tahun 2026.

**Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2026**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,2M)
2.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp150 Jt)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp50 M)
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	80

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	80
8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		83	



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, terhadap 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar Tahun 2025 telah memperoleh hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematangsiantar sebesar 115,98%. Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membanding antara target/ rencana dengan capaian/ realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Adapun rincian capaian kinerja atas 18 (delapan belas) IKU *Kemenkeu-Three* KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 1 Capaian Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025**

Kode	IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
	<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				111,55
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya				111,55
1a-CP	Indeks Integritas	100	105,29	105,29	105,29
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp8,3M)	124,67% (Rp10,4M)	124,67	120,00
	<i>Customer Perspective (20%)</i>				116,05
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				112,09
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	101,48%	101,48	101,48
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp128,9 M)	116,87% (Rp150,6M)	116,87	116,87
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp150 Jt)	418,77% (Rp628,1 Jt)	418,77	120,00
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				120,00
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	98,41	214,60	120,00
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,94	132,99	120,00

	<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				118,33
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif				120,00
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	216,42%	216,42	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,00%	120,00	120,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				116,67
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	110,00%	110,00	110,00
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	113,10%	161,56	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	110,33%	137,91	120,00
	<i>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</i>				118,90
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				119,17
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120,00	120,00	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	94,00%	117,50	117,50
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				117,54
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115,07	115,07	115,07
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	114,25	142,81	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				120,00
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98,90	123,62	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>					<b>115,98</b>

Pencapaian masing-masing sasaran strategis dan IKU KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategi 1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya**

#### **Indikator Kinerja Utama:**

#### **1a-CP Indeks Integritas**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden terdiri dari :

- Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- Eskternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 105,29 dari target 100. Sehingga, perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Namun demikian, KPKNL Pematangsiantar berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2025 dari capaian tahun ini.

Tabel 3. 2 Persentase Indeks Integritas Per 31 Desember 2025

KPKNL Pematangsiantar	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Max/ TLK
Realisasi	100,00	100,00	100,00	122,00	122,00	105,32	105,32	
Indeks Capaian IKU	100,00	100,00	100,00	122,00	122,00	105,32	105,32	
Indeks Max. 120	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain, melakukan permintaan partisipasi untuk mengikuti survey SPI, melakukan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal terkait Survei Penilaian Integritas, Kerangka Kerja Integritas, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* (WISE) serta Perlindungan Pelapor, melakukan kegiatan *integrity sharing*, serta amplifikasi konten media sosial berupa konten terkait “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” dan Saluran Pengaduan WISE pada seluruh saluran komunikasi yang dimiliki oleh KPKNL Pematangsiantar.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 1a-CP

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	92	-	105,32
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### 1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan

perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBPN Barang Milik Negara, (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:
  - a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset Kementerian/ Lembaga oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
  - b. pemanfaatan barang milik negara; dan
  - c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.
2. PNBPN Piutang Negara (PNBP PN) merupakan nilai pengurusan piutang negara yang berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
3. PNBPN Lelang merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL yang berupa:
  - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
  - b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
  - c. biaya permohonan lelang;
  - d. uang jaminan pembeli wanprestasi; dan
  - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
  - f. bea Lelang Pegadaian.

Untuk realisasi persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.408.191.834,00 atau 124,67% target yang ditetapkan yaitu, Rp8.348.916.000,00.

**Tabel 3. 4 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Per 31 Desember 2025**

Uraian	Target 2025 Sebelum Adendum	Target 2025 Setelah Adendum	Realisasi 2025
a. PNBP Aset	Rp2.855.000.000,00	Rp3.241.766.000,00	Rp4.588.140.625,00
b. PNBP Lelang	Rp2.630.000.000,00	Rp5.106.901.000,00	Rp5.819.407.321,00
c. PNBP Piutang Negara	Rp200.000,00	Rp249.000,00	Rp643.888,00
<b>Total</b>	<b>Rp5.485.200.000,00</b>	<b>Rp8,348.916.000,00</b>	<b>Rp10.408.191.834,00</b>
<b>Indeks Capaian IKU</b>			<b>124,67</b>

**Tabel 3. 5 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Tahun 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	93,26%	350,44%	350,44%	251,14%	251,14%	124,67%	124,67%	
Indeks Capaian IKU	93,26	350,44	350,44	251,14	251,14	124,67	124,67	
Indeks Max. 120	93,26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melaksanakan koordinasi dengan satker terkait, melaksanakan penagihan piutang negara secara langsung, melaksanakan penelitian lapangan kondisi debitur, berkoordinasi dengan stakeholder lelang selaku pemohon/penjual, melakukan penggalian potensi lelang, dan melakukan koordinasi terkait lelang pegadaian.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 6 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 1b-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	124,67
2024	100	100	100	100	-	128,94
2023	100	100	100	100	-	114,61
2022	100	100	100	100	-	120,00
2021	100	100	100	100	-	105,58
2020	100	100	100	100	-	78,33

## Sasaran Strategi 2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

### Indikator Kinerja Utama:

#### 2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, maka pelaksanaan pengukuran kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dengan menghimpun data BMN yang sedang digunakan langsung oleh satker, penggunaan sementara atau dioperasikan pihak lain, dan juga dimanfaatkan dengan kesesuaian kebijakan merupakan esensi dilakukannya kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dilakukan dalam periode 5 tahun yaitu pada 2020 sampai dengan tahun 2025 dengan pendistribusian target K/L berdasarkan jumlah satker dan BMN. Target keseluruhan tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara untuk tahun 2025 sebesar 100,00%.

Untuk realisasi s.d 31 Desember 2025 sebesar 101,48% atau 101,48 dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

**Tabel 3. 7 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	50,00%	60,00%	60,00%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	0,00%	85,19%	85,19%	86,90%	86,90%	101,48%	101,48%	
Indeks Capaian IKU	0	141,98	141,98	108,63	108,63	101,48	101,48	
Indeks Max. 120	0	120,00	120,00	108,63	108,63	101,48	101,48	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melaksanakan penelitian lapangan dan melaksanakan koordinasi dengan satker terkait optimalisasi pengelolaan aset negara.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 8 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 2a-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	101,48
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu:

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksanaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBP Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu. Capaian IKU pada tahun 2025 untuk IKU persentase realisasi pokok

lelang adalah sebesar 116,87% dengan nilai Rp128.908.061.000,00. Masing-masing capaiannya pada tahun 2025 dapat dilihat pada pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 9 Raw Data Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025**

No.	Uraian	Target Sebelum Adendum	Target Setelah Adendum	Realisasi
1.	Pokok Lelang Kelas I	Rp29.800.000.000,00	Rp68.808.061.000,00	Rp93.623.802.559,00
2.	Pokok Lelang Pegadaian	Rp60.200.000.000,00	Rp60.200.000.000,00	Rp57.036.856.900,00
	Total	Rp90.000.000.000,00	Rp128.908.061.000,00	Rp128.908.061.000,00
<b>Capaian IKU</b>				<b>116,87%</b>

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada perbankan terkait lelang, melakukan koordinasi dengan pegadaian dan melakukan penggalan potensi lelang, serta membuat konten sosial media terkait lelang.

**Tabel 3. 10 Persentase Realisasi Pokok Lelang Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	200,66%	307,09%	307,09%	225,54%	225,54%	116,87%	116,87%	
Capaian	200,66	307,09	307,09	225,54	225,54	116,87	116,87	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,87	116,87	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 11 Tabel Alignment Perjanjian Kinerja dengan Renstra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 2b-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	116,87
2024	100	-	100	-	-	115,22
2023	100	-	100	-	-	128,91
2022	100	-	100	-	-	166,31
2021	100	-	100	-	-	111,79
2020	100	-	100	-	-	112,95

## 2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PND/ Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (*debt to asset swap*);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp628.154.353,96 dengan persentase sebesar 418,77% dengan indeks tanpa batas sebesar 418,77 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.

**Tabel 3. 12 Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025**

Uraian	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi IKU
Tingkat penurunan nilai saldo piutang negara	Rp150.000.000,00	Rp628.154.353,96	<b>418,77%</b>

**Tabel 3. 13 Raw Data Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara Tahun 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	99,85%	122,67%	122,67%	68,57%	68,57%	418,77%	418,77%	
Capaian	99,85	122,67	122,67	68,57	68,57	418,77	418,77	
Nilai Kinerja	99,85	120,00	120,00	68,57	68,57	120	120	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melaksanakan penagihan piutang negara secara langsung, melaksanakan penelitian lapangan kondisi debitur.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 14 Tabel Alignment Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 2c-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	-	418,77
2024	100	-	-	-	-	144,68
2023	100	-	-	-	-	241,47
2022	100	-	-	-	-	270,84
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### Sasaran Strategi 3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

#### Indikator Kinerja Utama:

#### 3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan KPKNL Pematangsiantar terkait Piutang Negara dan Lelang kepada pihak eksternal untuk menunjang tingkat pemahaman pengguna layanan KPKNL Pematangsiantar sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara KPKNL Pematangsiantar secara umum. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 98,41 dari target 74 dengan indeks tanpa batas sebesar 132,99 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.

**Tabel 3. 15 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	Max/ Avg
Realisasi	100,00	92,70	96,35	110,00	100,90	90,96	98,41	
Capaian	135,14	125,27	130,20	148,65	136,35	122,92	132,99	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melaksanakan kegiatan edukasi dan komunikasi di bidang Piutang Negara dan Lelang untuk meningkatkan pemahaman/ pengetahuan para *stakeholders* terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 16 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Renstra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 3a-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	100	-	-	98,41
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### 3b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 95,94 dari target 77 dengan indeks tanpa batas sebesar 124,60 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.

**Tabel 3. 17 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	Max/ Avg
Realisasi	92,96	97,00	94,98	97,40	95,79	96,40	95,94	
Capaian	120,73	125,97	123,35	126,49	124,40	125,19	124,60	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, yaitu dengan memberikan pelayanan secara maksimal yang melampaui ekspektasi pengguna layanan dan melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan. Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 18 Tabel Alignment Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 3b-N**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	4,2 (skala 5)	4,2 (skala 5)	4,2 (skala 5)	-	95,94
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

#### Sasaran Strategi 4 Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

##### Indikator Kinerja Utama:

##### 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen

bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

K1 (SHP elektronik, update dan validasi di SIMAN):

KPKNL mendorong satker untuk Sertifikasi BMN K/L dan Kontraktor KKKS (SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang) dan Kontraktor PKP2B untuk Aset BMN PKP2B untuk pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas dan PKP2B untuk segera mengajukan pensertipikatan, selanjut SHP yang sudah terbit diupload oleh satuan kerja ke SIMAN serta data dan informasi diinput. Upload-an SHP dan inputan data dan informasi (a.l. luas, atas nama) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPKNL melalui menu valserah

K2 (dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan):

Kelengkapan dokumen pensertipikatan dimaksud, dibuktikan dengan:

- a. tanda terima penyerahan berkas ke kantah;
- b. surat kesepakatan satker/Kontraktor KKKS (BMN Hulu Migas)/SKK Migas/Kontraktor BMN PKP2B/KPKNL dengan kantah bahwa dokumen sudah lengkap dan dapat disertipikatan; atau
- c. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa dokumen yuridis telah lengkap sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1)

K3 (upaya pengosongan/penguasaan secara fisik oleh KL/satker (mediasi, gugatan, atau laporan ke APH):

- a. Mediasi dilakukan antara satuan kerja/KL, pihak ketiga yang menguasai, KPKNL, Kontraktor KKKS /SKK Migas/ Kontraktor BMN PKP2B, dan/atau melibatkan kantor desa dan/atau aparat setempat;
- b. Bukti gugatan/penanganan perkara secara optimal atau laporan ke APH; atau
- c. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa bidang tanah telah clean and clear sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1)

K4 (ganti nama menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN):

Merupakan bidang tanah yg sudah bersertipikat a.n. Pemri c.q. KL namun belum di update di SIMAN atau bidang tanah yang masih Bersertikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) yg dilakukan ganti nama, update, dan validasi di SIMAN. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 216,42% dari target 100% dengan indeks tanpa batas sebesar 124,6 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.

**Tabel 3. 19 Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Penerapan Tata Keola Aset yang Efektif							
	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	5,00%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	5,97%	23,88%	23,88%	58,21%	58,21%	216,42%	216,42%	
Capaian	119,40	59,70	59,70	97,01	97,01	124,60	124,60	
Nilai Kinerja	119,40	59,70	59,70	97,01	97,01	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan koordinasi dengan satker dan Kantor Pertanahan secara luring maupun daring.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 20 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 4a-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	216,42
2024	100	-	100	-	-	109,57
2023	100	-	100	-	-	160
2022	100	-	100	-	-	115,91
2021	100	-	100	-	-	100
2020	100	-	100	-	-	122,22

#### 4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan

terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kerjanya di tahun 2025. Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 120,00% dari target 100,00% dengan indeks tanpa batas dan dengan indeks batas maksimal sebesar 120,00.

**Tabel 3. 21 Persentase evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/ KP
Target	15%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	75,22%	110,65%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	501,45	221,30	160,00	160,00	160,00	120,00	120,00	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melaksanakan koordinasi dengan satker terkait evaluasi kinerja BMN dan melaksanakan penelitian lapangan terkait evaluasi kinerja BMN. Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 22 Tabel Alignment Perjanjian Kinerja dengan Renstra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 4b-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120,00
2024	100	-	100	-	-	121,91
2023	80	-	100	-	-	97,84
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

## Sasaran Strategi 5 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

### Indikator Kinerja Utama:

#### 5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPEN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,2)
  - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
  - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,1)
  - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
  - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen: 1)
  - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
  - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah

110,00% dari target 100,00% dengan indeks tanpa batas dan dengan indeks batas maksimal sebesar 110.

**Tabel 3. 23 Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	110,00%	110,00%	110,00%	110,00%	110,00%	110,00%	110,00%	
Capaian	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
Nilai Kinerja	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melaksanakan penggalan potensi ke debitur, melaksanakan penelitian lapangan kondisi debitur, dan melaksanakan penagihan secara langsung. Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 24 Tabel Alignment Perjanjian Kinerja dengan Renstra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 5a-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	-	110,00
2024	83	-	100	-	-	81,25
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 113,10% dari target 100,00% dengan indeks tanpa batas sebesar 161,56 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.

**Tabel 3. 25 Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	115,50%	115,48%	115,48%	115,44%	115,44%	113,10%	113,10%	
Capaian	165,00	164,97	164,97	164,91	164,91	161,56	161,56	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain berusaha menyelesaikan laporan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 26 Tabel Alignment Perjanjian Kinerja dengan Renstra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 5b-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	70	70	-	-	113,10
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### 5c-CP Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah pelaksanaan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

IKU persentase produktivitas lelang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang dalam setahun.

Realisasi Persentase produktivitas lelang s.d Triwulan IV 2025 adalah sebesar 110,33% dari target sebesar 80%, sehingga capaian menjadi 120%. Realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan komponen sebagai berikut:

1. Rata-rata Capaian Lot Lelang Laku:

- Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela adalah 19 dari total 19 lot lelang.
- Lot Laku Lelang noneksekusi wajib adalah 112 dari total 118 lot lelang.
- Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan adalah 117 dari total 742 lot lelang.
- Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan adalah 19 dari total 763 lot lelang.

2. Jumlah realisasi frekuensi lelang secara keseluruhan pada tahun 2025 adalah 1.642 dari target frekuensi lelang 641

dimana masing-masing capaiannya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 27 Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025**

No.	Rincian IKU	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Rata-rata Capaian Lot Lelang Laku (40%)		95,82%
2.	Persentase Frekuensi Lelang (60%)		120,00%
		80%	110,33%%
<b>Capaian IKU</b>		<b>120</b>	

Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 110,33% dari target 80% dengan indeks tanpa batas sebesar 137,91 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.

**Tabel 3. 28 Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	52,59%	45,69%	45,69%	101,07%	101,07%	110,33%	110,33%	
Capaian	175,29	114,22	114,22	144,39	144,39	137,91	137,91	
Nilai Kinerja	120,00	114,22	114,22	120,00	120,00	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada perbankan terkait lelang, melakukan koordinasi dengan pegadaian dan melakukan penggalian potensi lelang, serta membuat konten sosial media terkait lelang.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 29 Tabel *Allignment* Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 5c-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	80	-	-	110,33
2024	100	-	34	-	-	147,89
2023	80	-	34	-	-	105,00
2022	36	-	34	-	-	45,15
2021	35	-	34	-	-	39,16
2020	34	-	34	-	-	37,43

**Sasaran Strategi 6 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif**

**Indikator Kinerja Utama:**

**6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) .

Nilai kinerja anggaran Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari: 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 120,00 dari target 100,00 dengan indeks tanpa batas dan indeks batas maksimal sebesar 120,00.

**Tabel 3. 30 Indeks Kualitas Kinerja Anggaran Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Ketentuan perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) pada tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah:

- a. Capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d IV mengacu pada capaian IKPA Januari s.d triwulan periode pelaporan. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d IV sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN.
- b. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing, yaitu SMART 50% dan IKPA 50%.

Komponen perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) untuk Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 31 Rincian Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2025**

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Nilai	Bobot	Capaian s. d. Triwulan IV
<b>A. Nilai IKPA (50%)</b>				<b>100,00</b>
1.	Revisi DIPA	100	10	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	100	15	15
3.	Penyerapan Anggaran	100	20	20
4.	Belanja Kontraktual	100	10	10
5.	Penyelesaian Tagihan	100	10	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
7.	Dispensasi SPM	100	0	0
8.	Capaian Output	100	25	25
<b>B. Nilai SMART (50%)</b>				<b>96,44</b>
1.	Capaian Rincian Output	100	75%	75
2.	Penggunaan SBK	91,67	10%	9,17
3.	Efisiensi SBK	81,8	15%	12,27
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Desember 2025</b>				<b>100,00</b>
<b>Target IKPA</b>				<b>100,00</b>
<b>Realisasi IKPA s.d. Desember 2026</b>				<b>98,22</b>
<b>Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan IV</b>				<b>120,00%</b>

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain dengan menyampaikan Nota Dinas permintaan pengisian target capaian output TA 2025 dan realisasi capaian output per bulan.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 32 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Renstra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 6a-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	82,2	-	120,00
2024	100	95	95	95	-	120,00
2023	100	95	95	95	-	103,50
2022	95,5	95	95	95	-	95,73
2021	95,5	95	95	95	-	95,91
2020	95	95	95	95	-	96,48

### 6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan sdari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 120,00 dari target 100 dengan indeks tanpa batas dan indeks batas maksimal.sebesar 120,00.

**Tabel 3. 33 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK Akumulatif
Realisasi	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Capaian	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain dengan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan yang tepat, pelaksanaan pengadaan yang sesuai regulasi, serta pengendalian dan monitoring pelaksanaan kontrak secara berkelanjutan, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 34 Tabel Allignment Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 6b-N**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120,00
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### 6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKI ini mengukur dua komponen:

#### A. Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi

#### B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

##### 1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 94% dari target 80% dengan indeks tanpa batas dan indeks batas maksimal sebesar 117,5.

**Tabel 3. 35 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	25,64%	55,64%	55,64%	80,43%	80,43%	94%	94%	
Capaian	128,18	139,09	139,09	134,05	134,05	117,5	117,5	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,5	117,5	

Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain mendukung pelaksanaan diklat oleh pegawai yang dilakukan baik secara mandiri melalui KLC Kementerian Keuangan maupun melalui pemanggilan diklat yang dilakukan setiap bulannya.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 36 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Renstra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 6C-N**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	94,00
2024	90	-	-	-	-	119,44
2023	100	-	-	-	-	120,00
2022	100	-	-	-	-	120,00
2021	100	-	-	-	-	120,00
2020	100	-	-	-	-	120,00

## Sasaran Strategi 7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

### Indikator Kinerja Utama:

#### 7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

#### A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Bobot komponen: 80%

Target komponen: 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

#### B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan

- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya.

Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 115,07 dari target 100 dengan indeks tanpa batas dan indeks batas maksimal sebesar 115,07.

**Tabel 3. 37 Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	112,75	113,51	113,51	115,09	115,09	115,07	115,07	
Capaian	112,75	113,51	113,51	115,09	115,09	115,07	115,07	
Nilai Kinerja	112,75	113,52	113,52	115,09	115,09	115,07	115,07	

Realisasi Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada tahun 2025 mencapai 115,07 dari target yang ditetapkan sebesar 100, 115,07 dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal. Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain berkoordinasi dengan Pejabat Fungsional Pelelang, Kanwil DJKN Sumatera Utara, Direktorat Hukum dan Humas DJKN, dan Biro Advokasi Kementerian Keuangan terkait penanganan perkara, serta peningkatan kualitas dalam penanganan perkara.

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3. 38 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 7a-CP**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100,00	-	-	-	-	115,07
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### **7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
3. Ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

Realisasi IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) pada Tahun 2025 adalah sebesar 114,25 dari target 100, dengan indeks tanpa batas sebesar 142,81, serta 120,00 dari indeks batas maksimal. Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain penyampaian laporan informasi publik dengan tepat waktu, penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website secara tepat waktu, serta pemberian layanan permintaan informasi publik kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

**Tabel 3. 39 Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Per 31 Desember 2025**

KPKNL Pematangsiantar	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	100	100	100	100	100	100	Max/ Avg
Realisasi	115,00	116	115,50	116	115,67	110	114,25	
Capaian	143,75	145	144,38	145	144,58	137,50	142,81	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 40 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Rentra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 7b-N**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	114,25
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

### Sasaran Strategi 8 Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

#### Indikator Kinerja Utama:

#### 8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di

lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2025 adalah 98,90 dari target 80 dengan indeks tanpa batas sebesar 123,62 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal. Target IKU ini dapat dicapai dengan baik melalui berbagai langkah yang telah dilaksanakan, antara lain melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Risiko per triwulan, melaksanakan Dialog Kinerja Individu per bulan, melaksanakan rapat Refinement Indikator Kinerja Utama, melakukan koordinasi dengan pengelola kinerja Kanwil DJKN Sumut, serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana Seditjen DJKN.

**Tabel 3. 41 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

KPKNL Pematangsiantar	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif							
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	85	80	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	99,63	99,63	98,90	98,90	
Capaian	125,00	125,00	125,00	124,53	124,53	123,62	123,62	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kemenkeu, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu, dan Standar Nasional dari tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 42 Tabel *Alignment* Perjanjian Kinerja dengan Renstra, Renja, dan Standar Nasional Kinerja 8a-N**

Tahun	TARGET					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	98.90
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung seluruh operasional dan pencapaian target strategis organisasi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar telah mengelola sumber daya keuangan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran ini merupakan instrumen penting dalam membiayai berbagai kegiatan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, serta pelaksanaan lelang di wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar.

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan KPKNL Pematangsiantar dalam Tahun 2025 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan pagu sebesar Rp2.339.282.000,00 setelah revisi dan penghematan (*self blocking*) yang dilakukan sepanjang tahun 2025 direalisasikan penyerapan anggaran atas pagu tersebut sebesar Rp1.842.273.990,00,00 atau mencapai 78,75%, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 43 Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	2.260.482.000,00	1.806.637.210,00	79,92%
Belanja Modal	78.800.000,00	35.636.780,00	45,22%
<b>Total</b>	<b>2.339.282.000,00</b>	<b>1.842.273.990,00</b>	<b>78,75%</b>

## C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun Anggaran 2025, KPKNL Pematangsiantar berhasil melakukan efisiensi sumber daya anggaran sebesar 81,8% untuk belanja barang sesuai pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 44 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1. Capaian Rincian Output	100	75,00%	75,00
2. Penggunaan SBK	91,67	10,00%	9,17
3. Efisiensi SBK	81,8	15,00%	12,27
<b>Capaian NKPA</b>			<b>96,44</b>

Adapun rincian realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 KPKNL Pematangsiantar serta hubungannya dengan efisiensi yang penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 45 Rincian Pagu dan Realisasi Per Kegiatan di KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025

No.	Uraian RO	Anggaran (Rp)		% Realisasi	Target RO	Realisasi RO	% Realisasi
		Usulan Pagu Akhir	Realisasi s.d. 31 Des 2025				
1.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	59.280.000	50.518.280	85,22	45 Surat Keputusan	110 Surat Keputusan	100
2.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	12.000.000	11.827.000	98,56	4 Surat Keputusan	4 Surat Keputusan	100
3.	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	16.608.000	15.560.315	93,69	153 Rekomendasi Kebijakan	188 Rekomendasi Kebijakan	100
4.	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	32.294.000	7.824.000	24,23	50 Orang	50 Orang	100
5.	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	10.992.000	3.775.000	34,34	28 Orang	28 Orang	100
6.	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	1.540.000	-	0,00	30 Orang	30 Orang	100
7.	Risalah Lelang	11.006.000	10.901.000	99,05	340 Dokumen	345 Dokumen	100
8.	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	7.500.000	6.318.000	84,24	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
9.	Rekomendasi Hasil Penilaian	16.800.000	12.448.000	74,10	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100
10.	Penggalian Potensi Lelang	39.873.000	18.820.000	47,20	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100
11.	Aset BUN yang Dikelola	20.676.000	14.880.000	71,97	4 Aset	4 Aset	100

12.	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	29.562.000	26.452.000	89,48	52 Rekomendasi	128 Rekomendasi	100
13.	Pembinaan/Edukasi Publik	20.000.000	1.000.000	5,00	120 Orang	120 Orang	100
14.	Kehumasan	4.474.000	1.394.000	31,16	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
15.	Pameran/Eksibisi	12.500.000	3.559.000	28,47	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
16.	Kerumahtanggaan	133.912.000	106.127.085	79,25	12 Layanan	12 Layanan	100
17.	Layanan Bantuan Hukum	36.671.000	35.844.430	97,75	8 Layanan	9 Layanan	100
18.	Layanan Perkantoran	1.787.350.000	1.479.389.100	82,77	12 Layanan	12 Layanan	100
19.	Peralatan Fasilitas Perkantoran	78.800.000	35.636.780	45,22	10 Unit	10 Unit	100
20.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	7.444.000	-	0,00	8 Dokumen	8 Dokumen	100
		2.339.282.000	1.842.273.990	78,75			100

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target kinerja/ output TA 2025 pada setiap kegiatan telah dicapai dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Anggaran telah digunakan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien, tentunya dengan memastikan tujuan kegiatan dan target kinerja telah tercapai dengan baik.

Selain itu, dengan target dan *load* kerja yang semakin tinggi, alokasi sumber daya manusia KPKNL Pematangsiantar dapat dinyatakan lebih efisien dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan jumlah pegawai dari yang sebelumnya 25 orang menjadi 22 orang.

Selain itu, dapat disampaikan guna efisiensi untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai, KPKNL Pematangsiantar hanya membayarkan 80% dari standar biaya yang telah ditetapkan.



# 04.

## Penutup

- A. Simpulan Umum
- B. Strategi Pemecahan Masalah  
untuk Tahun Mendatang

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Pematangsiantar sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan untuk mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan hasil yang telah dicapai untuk setiap sasaran sebagai berikut:

1. Realisasi Indeks Integritas tahun 2025 adalah 105,29 dari target 100 atau sebesar 105,29 dengan indeks batas maksimal.
2. Realisasi berupa Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang berasal dari PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 124,67% dari target tahun 2025 sebesar 100% atau mencapai 120,00 dengan indeks batas maksimal dengan rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
  - a. Capaian PNBP Aset sebesar Rp4.588.140.625,00.
  - b. Capaian PNBP Piutang Negara sebesar Rp643.888,00.
  - c. Capaian PNBP Lelang sebesar Rp5.819.407.321,00.
3. Realisasi Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara s.d. 31 Desember 2025 adalah 101,48% dari target 100% atau sebesar 101,48 dengan indeks batas maksimal.
4. Realisasi Persentase Pokok Lelang s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 116,87% dari target 100% atau sebesar 116,87 dengan indeks batas maksimal dengan nilai Rp128.908.061.000,00, dengan rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
  - a. Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp93.623.802.559,00.
  - b. Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp57.036.856.900,00
5. Realisasi Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp628.154.353,96 dengan realisasi mencapai 418,77% dari target 100% atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
6. Realisasi Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 98,41 dari target 74 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
7. Realisasi Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 95,94 dari target 77 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.

8. Realisasi Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 216,42% dari target 100% atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
9. Realisasi Persentase evaluasi kinerja BMN s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 120,00% dari target 100% atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
10. Realisasi Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 110,00% dari target 100% atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
11. Realisasi Tingkat kualitas layanan penilaian s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 113,10% dari target 70% atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
12. Realisasi Persentase Produktivitas Lelang s.d. 31 Desember 2025 adalah sebesar 110,33% dari target 80% atau sebesar 120 dengan indeks batas maksimal.
13. Realisasi Indeks kualitas kinerja anggaran s.d. 31 Desember 2025 adalah 120,00 dari target 100,00 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
14. Realisasi Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa s.d. 31 Desember 2025 adalah 120,00 dari target 100,00 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
15. Realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai s.d. 31 Desember 2025 adalah 94,00% dari target 80% atau sebesar 117,50 dengan indeks batas maksimal.
16. Realisasi Indeks penanganan permasalahan hukum s.d. 31 Desember 2025 adalah 115,07 dari target 100 atau sebesar 115,07 dengan indeks batas maksimal.
17. Realisasi Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) s.d. 31 Desember 2025 adalah 114,25 dari target 80 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.
18. Realisasi Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko s.d. 31 Desember 2025 adalah 98,90 dari target 80 atau sebesar 120,00 dengan indeks batas maksimal.

Dari 18 (delapan belas) IKU sebagai penjabaran dari 8 (delapan) Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Pematangsiantar, dapat disimpulkan seluruh IKU berstatus hijau, sehingga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 sebesar 115,98.

## B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Pematangsiantar mempunyai beberapa strategi dan rencana aksi, antara lain:

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
  - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perolehan/optimalisasi PNBPA Aset (Proses permohonan, monev persetujuan, potensi/optimalisasi PNBPA, *sharing* data PNBPA).
  - b. Melakukan rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan sertifikasi BMN.
  - c. Melakukan monev *progress* sertifikasi BMN (termasuk revisi jika ada).
  - d. Menyusun laporan (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan).
  - e. Melakukan koordinasi dan penelitian lapangan portofolio aset ke satuan kerja target.
  - f. Melakukan monitoring atas persetujuan yang terbit.
  - g. Melakukan pemeriksaan fisik dalam hal diperlukan guna memastikan persetujuan dapat ditindaklanjuti.
  - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal diperlukan terkait tindak lanjut pengelolaan BMN.
2. Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah
  - a. Melakukan survei data properti dalam rangka pembentukan basis data Penilaian, mencakup: survei tanah; survei sewa tanah; survei ruang pertemuan.
  - b. Mengikuti kegiatan verifikasi kompetensi Penilai Pemerintah, antara lain: ujian pemaparan; ujian tertulis.
  - c. Melakukan penyusunan daftar komponen di bidang Penilaian, yaitu menyampaikan masukan dan evaluasi ke Kanwil terkait penyusunan DKPS dan/atau DKPB tahun sebelumnya, mengikuti kegiatan edukasi dan pembinaan terkait tabulasi data DKPS dan menyampaikan rencana kerja penyusunan DKPB, melakukan survei lapangan DKPB dan/atau DKPS melakukan pengolahan data permodelan DKPS dan DKPB dan selanjutnya disampaikan ke Kanwil DJKN.
  - d. Melakukan kendali mutu atas konsep laporan penilaian yang dilakukan Penilai Pemerintah, guna memastikan efektifitas opini nilai yang dihasilkan dalam pelaksanaan penilaian, berupa penilaian dalam rangka pemindahtanganan melalui lelang atas BMN, barang rampasan, aset eks. BDL dan aset eks. BPPN serta penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN.
3. Seksi Piutang Negara

- a. Penelitian/pemeriksaan terhadap keberadaan dan kemampuan debitur untuk penerbitan PSBDT, penyerah piutang RS Adam Malik.
  - b. Penagihan langsung secara on the spot kepada debitur penyerahan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Tebing Tinggi, Kominfo, LPDB, BPHutan Wil. II Medan.
  - c. Melakukan koordinasi ke penyerah piutang.
  - d. Melakukan komunikasi persuasif melalui telepon, *WhatsApp*, dan kunjungan langsung kepada debitur.
  - e. Melaksanakan edukasi dan komunikasi di bidang piutang negara.
4. Pejabat Fungsional Pelelang
- a. Berkoordinasi dengan stakeholder lelang selaku pemohon/penjual terkait monev kinerja 2025, strategi dan langkah pencapaian 2025 termasuk mitigasi lelang batal karena gagal plotting untuk penerbitan SKPT.
  - b. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait penyamaan persepsi dalam proses penerbitan SKPT.
  - c. Penggalian potensi lelang termasuk jenis lelang baru seperti hak menikmati.
  - d. Melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis terkait lelang.
  - e. Membuat telaahan sebagai masukan yang disampaikan ke Kantor Pusat secara berjenjang guna perbaikan layanan dan proses bisnis lelang.
  - f. Berkolaborasi dengan instansi Pembina UMKM dalam agenda pemberdayaan UMKM.
5. Subbagian Umum
- a. Melakukan *crosscheck* antara Subbagian Umum dengan seksi teknis terkait target output tiap RO.
  - b. Melakukan persiapan pelaksanaan Anggaran TA 2026.
  - c. Mendukung pelaksanaan diklat pegawai TA 2026.
6. Seksi Hukum dan Informasi
- a. Menjawab seluruh permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh para pengguna jasa dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian data pemohon dan informasi yang dibutuhkan pada tautan yang telah disediakan.
  - b. Memberikan bantuan hukum berupa pendapat, kajian, nasihat, dan saran di bidang hukum perdata, tata usaha negara (TUN), niaga, agama, dan perpajakan pada bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, menghadiri sidang perkara pidana/ perdata, menjawab seluruh permintaan pendapat hukum yang dimohonkan, serta melakukan koordinasi dengan Biro

Advokasi, Direktorat Hukum dan Humas DJKN, dan Kanwil DJKN Sumatera Utara terkait penyelesaian perkara.

7. Seksi Kepatuhan Internal

- a. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko per triwulan.
- b. Melakukan Reviu K3, Reviu PKMRO.
- c. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat per triwulan.

Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Pematangsiantar. Selanjutnya, Laporan Kinerja agar dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan *stakeholders* serta menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.



**Lampiran**



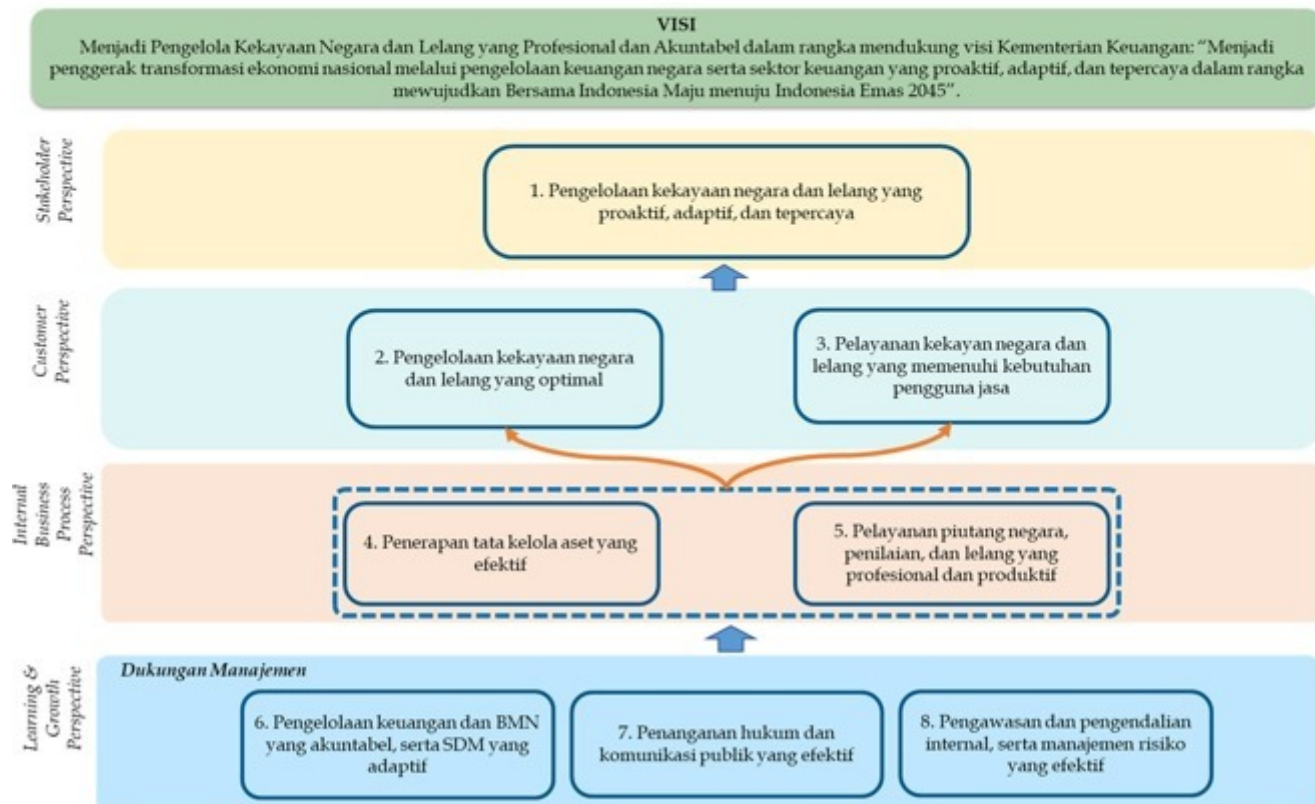
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-2/WKN.02/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PEMATANG SIANTAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PEMATANG SIANTAR  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp90 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp150 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

**Program/Kegiatan 2025**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Kegiatan

**Anggaran**

Rp265,752,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp44,532,000
2. Pengelolaan Aset	Rp221,220,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp1,937,341,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp34,985,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,856,252,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp38,660,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp7,444,000

Kota Pematang Siantar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dodok Dwi Handoko

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Hendri Daniel Tobing



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PEMATANG SIANTAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,4 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp90 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp150 Jt)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Pematang Siantar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Hendri Daniel Tobing



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG SIANTAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Pematang Siantar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Hendri Daniel Tobing



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Hendri Daniel Tobing		NAMA	Dodok Dwi Handoko
NIP	19670210 199303 1 001		NIP	19750815 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,4 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp90 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp150 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<p>sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Pematang Siantar, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko  
19750815 199503 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Hendri Daniel Tobing  
19670210 199303 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	24 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,4 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp90 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp150 Jt)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

#### KONSEKUENSI

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*

*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



Kota Pematang Siantar, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dodok Dwi Handoko  
19750815 199503 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Hendri Daniel Tobing  
19670210 199303 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*





	negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang									negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp90 M)	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp128,9 M)

Kota Pematang Siantar, 4 November 2025

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar,



Ditandatangani secara elektronik  
Nofiansyah



Ditandatangani secara elektronik  
Harmonis Siregar



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp5,4 M)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp90 M)	<i>Penerima Layanan</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp8,3 M)	<i>Penerima Layanan</i>
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp128,9M)	<i>Penerima Layanan</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% (Rp5,4 M)	1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% (Rp8,3M)
2	Persentase realisasi pokok lelang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% (Rp90 M)	2	Persentase realisasi pokok lelang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100% (Rp128,9 M)

Kota Pematang Siantar, 4 November 2025

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Harmonis Siregar

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Nofiansyah



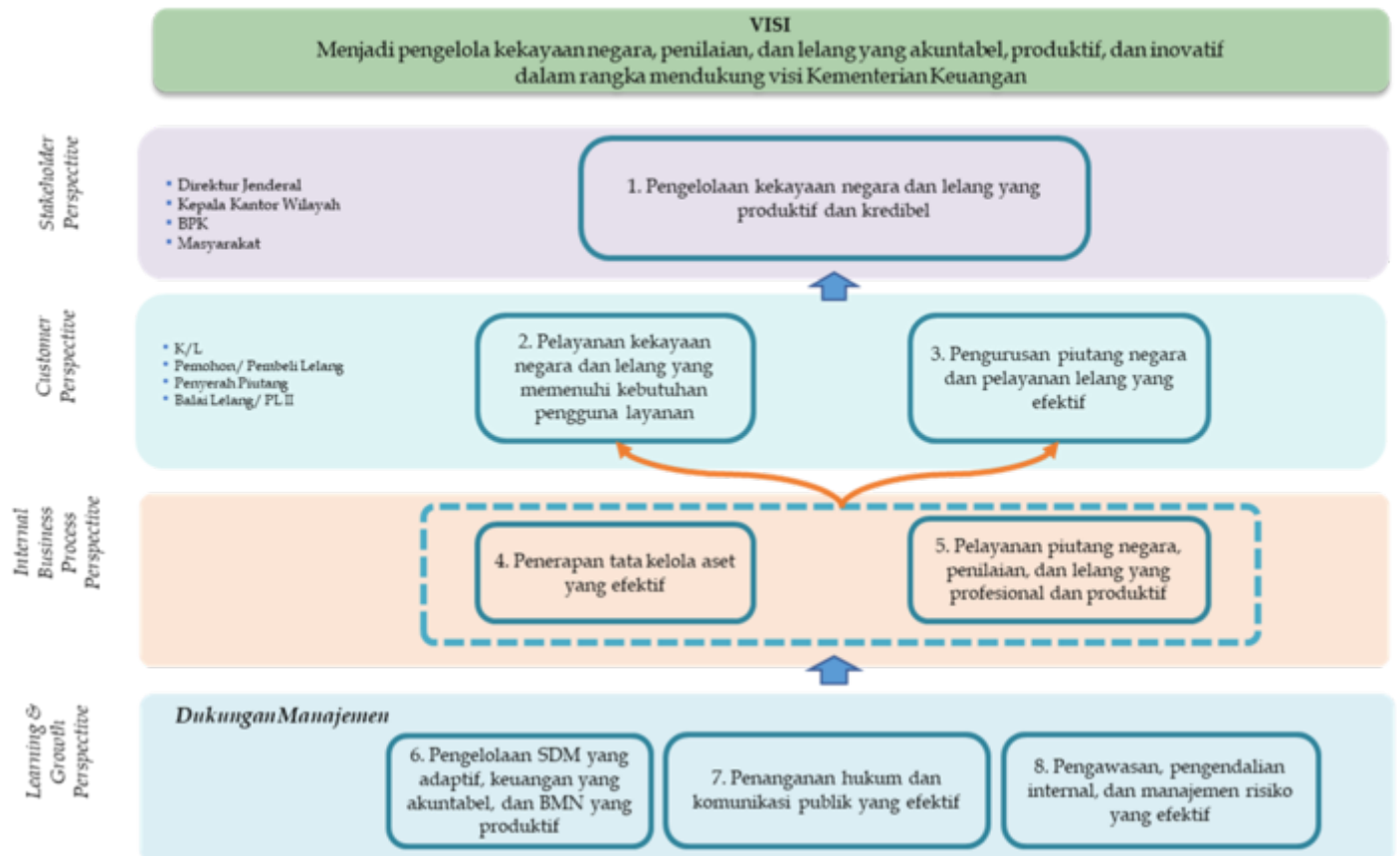
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-2/WKN.02/2026**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PEMATANG SIANTAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PEMATANG SIANTAR  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,2 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp150 Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp50 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif.	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

**Program/Kegiatan 2026**

**Anggaran**

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp446,671,000

Kegiatan



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp61,197,000
2. Pengelolaan Aset	Rp385,474,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp1,844,746,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp34,976,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,765,746,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp39,008,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp5,016,000

Kota Pematang Siantar, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Harmonis Siregar



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PEMATANG SIANTAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,2 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan</b>							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp150 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp50 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif.</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Kota Pematang Siantar, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Harmonis Siregar



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG SIANTAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Pematang Siantar, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik  
Harmonis Siregar



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Harmonis Siregar		NAMA	Nofiansyah
NIP	19691122 199603 1 001		NIP	19741111 199403 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,2 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp150 Jt)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp50 M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Pematang Siantar, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Harmonis Siregar

19691122 199603 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nofiansyah

19741111 199403 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	24 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,2 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp150 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp50 M)
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

#### KONSEKUENSI

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*

*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



Kota Pematang Siantar, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Harmonis Siregar  
19691122 199603 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nofiansyah  
19741111 199403 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
**ESELON I** : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
**SATUAN KERJA** : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR 119703

Tgl Data : 02/02/26 8:06 AM  
Tgl Cetak : 02/02/26 2:24 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>2,339,282,000</b>	<b>1,842,273,990</b>	<b>(497,008,010)</b>	<b>78.75</b>	<b>2,268,410,000</b>	<b>2,155,922,116</b>	<b>(112,487,884)</b>	<b>95.04</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

Pematang Siantar, 2 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

HARMONIS SIREGAR  
NIP 196911221996031001

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			258,131,000	
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			44,826,000	
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	108,0 orang, kegiatan		44,826,000	
-----					
	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR				
<b>4796.AEF.001</b>	<b>Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara</b>	<b>50.0 orang</b>		<b>32,294,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>32,294,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			32,294,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			24,140,000	A RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar )				
	- Makan Rapat Biasa [50 ORG x 1 HARI x 4 FREK]	200.0 OK	47,000	9,400,000	*
	- Souvenir [50 ORG x 4 FREK]	200.0 OK	60,000	12,000,000	*
	- Snack Rapat Biasa [50 ORG x 1 HARI x 4 FREK]	200.0 OK	13,700	2,740,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			7,274,000	A RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar )				
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA)	4.0 OH	382,500	1,530,000	SBM
	- Transport [5 ORG x 2 FREK]	10.0 OK	278,400	2,784,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [5 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	10.0 OH	296,000	2,960,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			880,000	A RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar )				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	8.0 OH	110,000	880,000	*
<b>4796.AEF.002</b>	<b>Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara</b>	<b>28.0 orang</b>		<b>10,992,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>10,992,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			10,992,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,280,000	RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar )				
	- Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA	20.0 OK	47,000	940,000	SBM
	- Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA	20.0 OK	17,000	340,000	SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			9,712,000	A RM
	(KPPN.005-Pematang Siantar )				
	- Transport [3 ORG x 2 FREK]	6.0 OK	200,000	1,200,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [3 ORG x 3 HARI x 2 FREK]	18.0 OH	296,000	5,328,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA)	6.0 OH	530,667	3,184,000	*
<b>4796.AEF.003</b>	<b>Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang</b>	<b>30.0 orang</b>		<b>1,540,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>1,540,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>TANPA SUB KOMPONEN</b>			1,540,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara  
 UNIT KERJA (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
 ALOKASI Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			1,540,000	A	PNP
	- Makan Rapat Biasa [30 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	30.0 OK	34,350	1,030,000	*	
	- Snack Rapat Biasa [30 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	30.0 OK	17,000	510,000	*	
4798	<u>Pengelolaan Aset</u>			213,305,000		
4798.AAH	<u>Peraturan lainnya[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</u>	49.0 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan		71,280,000		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
4798.AAH.001	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR <b>Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara</b>	<b>45.0 Surat Keputusan</b>		<b>59,280,000</b>		
005	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>59,280,000</b>	U	
A	<i>Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL</i>			13,488,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			11,888,000		RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [3 ORG x 2 HARI x 3 FREK]	18.0 OH	296,000	5,328,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat eselon IV Golongan III (Sumatera Utara) [3 ORG x 1 HARI x 3 FREK]	9.0 OH	540,000	4,860,000		
	- Transport [3 ORG x 3 FREK]	9.0 OK	188,889	1,700,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			1,600,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	16.0 OH	100,000	1,600,000	*	
B	<i>Survei Lapangan dan Penilaian</i>			45,792,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			39,310,000		RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara)	66.0 OH	296,000	19,536,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA)	28.0 OH	470,500	13,174,000		
	- Transport [3 ORG x 11 FREK]	33.0 OK	200,000	6,600,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			6,482,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	56.0 OH	115,750	6,482,000	*	
4798.AAH.002	<b>Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara</b>	<b>4.0 Surat Keputusan</b>		<b>12,000,000</b>		
005	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>12,000,000</b>	U	
A	<i>Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara</i>			12,000,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			10,920,000		RM
	- Transport [1 ORG x 10 FREK]	10.0 OK	150,000	1,500,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [1 ORG x 2 HARI x 10 FREK]	20.0 OH	296,000	5,920,000		
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [1 ORG x 1 HARI x 10 FREK]	10.0 OH	350,000	3,500,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	9.0 OH	120,000	1,080,000	RM
4798.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	153.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		16,608,000	
4798.ABA.002	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR <b>Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset</b>	<b>153.0 Rekomendasi Kebijakan</b>		<b>16,608,000</b>	
005 A	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b> <i>Implementasi Evaluasi Portofolio Aset</i>			<b>16,608,000</b>	<b>U</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 3 FREK] - Transportasi [3 ORG x 3 FREK] - Penginapan [3 ORG x 1 HARI x 3 FREK]	18.0 OH 9.0 OK 9.0 OH	296,000 586,667 400,000	5,328,000 5,280,000 3,600,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam [2 ORG x 2 HARI x 5 FREK]	20.0 OH	120,000	2,400,000	RM
4798.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	340.0 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		11,006,000	
4798.BAH.001	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR <b>Risalah Lelang</b>	<b>340.0 dokumen</b>		<b>11,006,000</b>	
100 A	<b>Tidak Ada Komponen</b> <i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<b>11,006,000</b>	<b>U</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Transport [1 ORG x 6 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [1 ORG x 1 HARI x 6 FREK] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 ORG x 2 HARI x 6 FREK]	6.0 Of 6.0 OH 24.0 OH	287,000 383,334 266,000	1,722,000 2,300,000 6,384,000	PNP
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	5.0 OH	120,000	600,000	PNP
4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	5.0 Laporan, Rekomendasi		64,173,000	
4798.FAE.004	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR <b>Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara</b>	<b>1.0 Rekomendasi</b>		<b>7,500,000</b>	
005 A	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b> <i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL</i>			<b>7,500,000</b>	<b>U</b>

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Penginapan [3 ORG x 1 HARI x 2 FREK] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [3 ORG x 2 HARI x 2 FREK] - Transport [3 ORG x 2 FREK]	6.0 OH 12.0 OH 6.0 OK	158,000 296,000 200,000	5,700,000 948,000 3,552,000 1,200,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	18.0 OH	100,000	1,800,000 1,800,000	RM
<b>4798.FAE.005</b>	<b>Rekomendasi Hasil Penilaian</b>	<b>2.0 Rekomendasi</b>		<b>16,800,000</b>	
<b>005</b>	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>16,800,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian</i>			<i>8,400,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) - Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Pematang Siantar	4.0 OH 2.0 OK	296,000 240,000	1,664,000 1,184,000 480,000	RM SBM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	64.0 OK	105,250	6,736,000 6,736,000	RM
<b>B</b>	<i>Survei DKPB</i>			<i>8,400,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) - Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Pematang Siantar	10.0 OH 6.0 OK	316,400 225,000	4,514,000 3,164,000 1,350,000	RM SBM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	40.0 OH	97,150	3,886,000 3,886,000	RM
<b>4798.FAE.007</b>	<b>Penggalian Potensi Lelang</b>	<b>2.0 Rekomendasi</b>		<b>39,873,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>39,873,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>39,873,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Snack Rapat Biasa [50 ORG x 1 FREK] - Makan Rapat Biasa [50 ORG x 1 FREK]	50.0 OF 50.0 OF	16,980 47,000	3,199,000 849,000 2,350,000	A PNP *
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) - Transportasi	40.0 OH 10.0 OH 40.0 OK	296,000 699,000 392,100	34,514,000 11,840,000 6,990,000 15,684,000	A PNP * SBM *

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	18.0 OH	120,000	2,160,000	A	PNP
4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	4.0 Unit, Aset		20,676,000	*	
4798.FAK.001	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR Aset BUN yang Dikelola	4.0 Aset		20,676,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			20,676,000	U	
A	Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain			20,676,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.005-Pematang Siantar ) > Aset Eks BPPN - - Fotokopi dan Penjilidan	1.0 THN	1,000,000	1,000,000		RM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.005-Pematang Siantar ) > Aset Eks BPPN - - Uang Balas Jasa Waker [4 ASET x 12 BLN]	48.0 OB	300,000	14,400,000		RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.005-Pematang Siantar ) > Aset Eks BPPN >> Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Eks BPPN - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) - -Transport	6.0 OH 2.0 OH	296,000 400,000	2,576,000 2,576,000 1,776,000 800,000		RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar ) > Aset Eks BPPN >> Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Eks BPPN - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara) [3 ORG x 2 HARI x 3 FREK]	18.0 OH	150,000	2,700,000 2,700,000 2,700,000		RM
4798.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	52.0 Laporan, Rekomendasi		29,562,000		SBM
4798.UAE.201	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	52.0 Rekomendasi		29,562,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			29,562,000	U	
A	TANPA SUB KOMPONEN			29,562,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA - Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA	50.0 OK 50.0 OK	47,000 17,000	2,350,000 850,000		RM

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Transportasi [3 ORG x 4 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara)	12.0 OK 24.0 OH 42.0 OH	225,000 441,917 288,000	25,402,000 2,700,000 10,606,000 12,096,000	A * * *	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	8.0 OH	120,000	960,000 960,000	A *	RM
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen			2,081,151,000		
4700	Legislasi dan Litigasi			36,671,000		
4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	8.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		36,671,000		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
4700.EBA.969	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR <b>Layanan Bantuan Hukum</b>	<b>8.0 Layanan</b>		<b>36,671,000</b>		
100	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>36,671,000</b>	U	
A	<i>Pelaksanaan Bantuan Hukum</i>			36,671,000		
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Biaya Pengambilan Salinan Putusan	10.0 FREK	100,000	1,000,000 1,000,000		RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) - Transport [1 ORG x 30 FREK]	70.0 OH 6.0 OH 30.0 OK	287,515 554,167 261,334	31,291,000 20,126,000 3,325,000 7,840,000		RM SBM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	40.0 OH	109,500	4,380,000 4,380,000		RM SBM
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			2,000,062,000		
4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	24.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1,921,262,000		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
4701.EBA.002	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR <b>Kerumahtangaan</b>	<b>12.0 Layanan</b>		<b>133,912,000</b>		
100	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>133,912,000</b>	U	
A	<i>Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan</i>			133,912,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			3,995,000	RM
	- Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA	85.0 OK	30,000	2,550,000	SBM
	- Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA	85.0 OK	17,000	1,445,000	SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			129,437,000	A RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 ORG x 2 HARI x 52 FREK]	208.0 OH	275,640	57,333,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [2 ORG x 1 HARI x 52 FREK]	104.0 OH	493,308	51,304,000	*
	- Transport [2 ORG x 52 FREK]	104.0 OK	200,000	20,800,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			480,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	4.0 OH	120,000	480,000	
<b>4701.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12.0 Layanan</b>		<b>1,787,350,000</b>	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>1,787,350,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Operasionalisasi Kantor</i>			<i>953,788,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			662,010,000	RM
	- Pojok Kudapan	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Benda pos/ materai	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
	- Pakaian Kerja Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Kebersihan [8 ORG x 2 SETEL]	16.0 SETEL	938,000	15,008,000	
	- Pakaian Kerja Satpam [4 ORG x 2 SETEL]	8.0 SETEL	1,554,000	12,432,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [25 ORG x 2 SETEL]	50.0 SETEL	1,134,000	56,700,000	
	- Honorarium Satpam dan Pengemudi SUMATERA UTARA [5 ORG x 13 BLN]	65.0 OB	3,278,000	213,070,000	
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Sumatera Utara)	1.0 ST	70,020,000	70,020,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti SUMATERA UTARA [7 ORG x 13 BLN]	91.0 OB	2,980,000	271,180,000	
	- Biaya Jamuan Tamu	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			8,208,000	RM
	- Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh [36 ORG x 12 FREK]	432.0 OK	19,000	8,208,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			9,960,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	830,000	9,960,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			113,280,000	RM
	> Honorarium Petugas SAI			113,280,000	
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	150,000	5,400,000	
	- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	>> Honorarium Pengelola Anggaran		0	52,800,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	1,370,000	16,440,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	1,330,000	15,960,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	530,000	6,360,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	470,000	5,640,000	
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	350,000	8,400,000	
	>> Honorarium Pengelola PNBPNBP		0	38,160,000	
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola PNBPNBP (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	12.0 OB	530,000	6,360,000	
	- Honorarium Anggota Pengelola PNBPNBP (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) 5 ORG x 12 BLN [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	400,000	24,000,000	
	>> Honorarium Pengurus/ Penyimpan BMN		0	2,160,000	
	- Honorarium Pengurus/ Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	12.0 OB	180,000	2,160,000	
	>> Honorarium Pejabat Pengadaan		0	8,160,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12.0 OB	680,000	8,160,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			52,500,000	RM
	- Pemeriksaan Kesehatan Pegawai [35 ORG x 1 FREK]	35.0 OH	1,500,000	52,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			100,000,000	A RM
	- ATK dan Persediaan Komputer	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	*
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			1,578,000	RM
	- Biaya Langganan Telepon	6.0 BLN	263,000	1,578,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			4,920,000	RM
	- Biaya Langganan Air dan Gas	12.0 BLN	410,000	4,920,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			1,332,000	RM
	- Layanan Pengaduan	12.0 BLN	111,000	1,332,000	
B	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			253,815,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			253,815,000	A	RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Sumatera Utara)	6.0 UNIT	5,020,000	30,120,000		
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sumatera Utara)	5.0 UNIT	34,494,000	172,470,000		
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	25.0 PEG	80,000	2,000,000		
	- Pemeliharaan AC Split	28.0 UNIT	610,000	17,080,000		
	- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	1.0 UNIT	2,000,000	2,000,000	*	
	- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 75 KVA	1.0 UNIT	13,640,000	13,640,000		
	- Pemeliharaan Faksimile	1.0 UNIT	500,000	500,000	*	
	- Pemeliharaan Mesin Fotokopi	2.0 UNIT	3,000,000	6,000,000	*	
	- Pemeliharaan Soundsystem	3.0 UNIT	1,000,000	3,000,000		
	- Pemeliharaan LCD Projektor	2.0 UNIT	650,000	1,300,000	*	
	- Pemeliharaan CCTV	1.0 UNIT	1,450,000	1,450,000		
	- Pemeliharaan Alat Pemadam Api	7.0 UNIT	465,000	3,255,000		
	- Pemeliharaan Focusing Screen	2.0 UNIT	500,000	1,000,000	*	
C	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			543,092,000		
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			543,092,000	A	RM
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Utara)	1285.0 M2	229,000	294,265,000	*	
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Sumatera Utara)	1017.0 M2	171,000	173,907,000	*	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Sumatera Utara)	3492.0 M2	21,455	74,920,000	*	
TJ	<u>Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)</u>			36,655,000		
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			36,655,000		RM
	- Pemeliharaan Server [2 UNIT]	2.0 UNIT	1,000,000	2,000,000		
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	52.0 Unit	229,039	11,910,000		
	- Pemeliharaan Jaringan LAN Dropping 2023	1.0 Unit	10,000,000	10,000,000		
	- Pemeliharaan Printer	15.0 Unit	549,667	8,245,000		
	- Pemeliharaan Scanner	7.0 Unit	500,000	3,500,000		
	- Pemeliharaan UPS	2.0 Unit	500,000	1,000,000		
4701.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</u>	10.0 Unit, m2, Paket		78,800,000		
	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR					
4701.EBB.001	<b>Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>10.0 Unit</b>		<b>78,800,000</b>		
100	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>78,800,000</b>	U	
A	TANPA SUB KOMPONEN			78,800,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
**ALOKASI** Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.005-Pematang Siantar )			78,800,000	A	RM
	> Top Up Revisi DJA TW III			78,800,000		
	- Rak Arsip	10.0 Unit	3,940,000	39,400,000		
	- Rak Arsip	10.0 Unit	3,940,000	39,400,000	*	
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik			36,974,000		
4702.BMB	Komunikasi Publik[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	133.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		36,974,000		
-----						
	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR					
4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	120.0 Orang		20,000,000		
100	Tidak Ada Komponen			20,000,000	U	
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,000,000		
521211	Belanja Bahan (KPPN.005-Pematang Siantar )			19,000,000	A	RM
	- Perlengkapan	1.0 THN	2,320,000	2,320,000	*	
	- Snack Rapat Biasa SUMATERA UTARA	120.0 OK	12,834	1,540,000	*	
	- Souvenir [100 ORG x 1 FREK]	100.0 OK	100,000	10,000,000	*	
	- Makan Rapat Biasa SUMATERA UTARA	120.0 OK	42,834	5,140,000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.005-Pematang Siantar )			1,000,000		RM
	- Honorarium Jurnalis	1.0 OK	500,000	500,000		
	- Honorarium Akademisi	1.0 OK	500,000	500,000		
4702.BMB.002	Kehumasan	12.0 kegiatan		4,474,000		
100	Tidak Ada Komponen			4,474,000	U	
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,474,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.005-Pematang Siantar )			3,874,000	A	RM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA)	2.0 OH	250,000	500,000	*	
	- Transportasi [1 ORG x 5 FREK]	5.0 OK	200,000	1,000,000	*	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara)	10.0 OH	237,400	2,374,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.005-Pematang Siantar )			600,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara)	5.0 OH	120,000	600,000	*	
4702.BMB.003	Pameran/Eksibisi	1.0 kegiatan		12,500,000		
100	Tidak Ada Komponen			12,500,000	U	
A	TANPA SUB KOMPONEN			12,500,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara  
 UNIT KERJA (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR  
 ALOKASI Rp. 2,339,282,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			12,500,000	A	RM
	- Souvenir [70 ORG x 1 FREK]	70.0 OK	100,000	7,000,000	*	
	- Perlengkapan	1.0 THN	5,500,000	5,500,000	*	
4704	<u>Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal</u>			7,444,000		
4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	6.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		7,444,000		
-----						
4704.EBD.001	Lokasi : KOTA PEMATANGSIANTAR <b>Rekomendasi Kepatuhan Internal</b>	<b>6.0 Dokumen</b>		<b>7,444,000</b>		
100	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>7,444,000</b>	U	
A	TANPA SUB KOMPONEN			7,444,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			6,944,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [1 ORG x 2 HARI x 7 FREK]	14.0 OH	296,000	4,144,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (Sumatera Utara) [1 ORG x 1 HARI x 7 FREK]	7.0 OH	300,000	2,100,000	*	
	- Transport [1 ORG x 7 FREK]	7.0 OK	100,000	700,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.005-Pematang Siantar )			500,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara) [1 ORG x 5 FREK]	5.0 OH	100,000	500,000	*	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pematang Siantar, 3 Februari 2026

